BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi (OP) atau badan dalam satu tahun pajak. Adapun definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah “Setiap penghasilan berupa penambahan atas kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh setiap Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan berupa konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak baik itu berupa nama dan dalam bentuk apapun”. Erly Suandy (2011) mengungkapkan bahwa pajak atas penghasilan dilakukan dalam periode masa pajak maupun tahun pajak yang dikenakan secara periodik.

Pajak penghasilan termasuk ke dalam jenis pajak langsung. Pajak langsung dapat diartikan sebagai pajak yang pembebanannya diberikan secara langsung kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada Wajib Pajak lain. Maka dari itu, Wajib Pajak wajib membayar sendiri beban perpajakannya.

Definisi pajak yang telah dibahas sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan Wajib Pajak kepada pemerintah atas seluruh tambahan berupa kemampuan ekonomis yang diperoleh dalam satu tahun pajak, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.2 Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pajak penghasilan terbagi dalam berbagai jenis pajak, salah satunya yaitu pajak penghasilan final (PPh final). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan final merupakan pajak yang memiliki tarif khusus dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: mendorong investasi dan tabungan masyarakat, mengurangi kesulitan dalam pemungutan pajak, beban administrasi yang ditimbulkan akibat perpajakan dapat berkurang baik dari sisi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak yang dikenakan lebih merata serta melihat perkembangan ekonomi dan moneter.

PPh final ditetapkan dengan tujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penghasilan final yang diterima Wajib Pajak akan langsung dipotong sesuai dengan tarif yang berlaku. Pemotongan PPh final yang dilakukan secara langsung sudah memenuhi kewajiban perpajakan sehingga tidak ada lagi PPh final yang terutang. Oleh karena itu, Wajib Pajak tidak dapat mengkreditkan PPh final saat pelaporan SPT Tahunan.

PPh final memiliki berbagai macam kategori penghasilan yang dapat dikenakan PPh final. Salah satu penghasilan yang pengenaannya merupakan

penghasilan atas PPh final yaitu Penghasilan yang diperoleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2.1.3 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU 20/2008) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa UMKM terdiri dari tiga bagian usaha mikro, kecil, dan menengah. Masing-masing bagian memiliki pengertian yang berbeda. Usaha mikro lebih sederhana dibandingkan dengan kedua usaha lainnya karena merupakan jenis usaha produktif sedangkan dua lainnya merupakan usaha ekonomi produktif.

Menurut Ruditjo (n.d, dikutip dalam Redaksi OCBC NISP, 2021), UMKM memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian negara Indonesia. UMKM menjadi pintu untuk membuka lapangan kerja serta skala usaha yang tidak terlalu besar dapat mempengaruhi jumlah usahanya.

2.1.4 Kriteria Pemajakan UMKM

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disahkan, kriteria UMKM mengacu pada UU 20/2008. Berdasarkan UU 20/2008, kriteria UMKM terdiri dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kriteria UMKM dapat dilihat dalam Tabel II.1. Setelah UU Cipta Kerja berlaku, kriteria UMKM mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perubahan kriteria terletak pada modal usaha yang semula adalah kekayaan bersih. Kriteria

UMKM yang baru, diatur dalam Pasal 35 ayat 1 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.2.

Tabel II.1 Kriteria UMKM Menurut UU 20/2008

No.	Keterangan	Kekayaan Bersih (selain tanah dan bangunan)	Hasil Penjualan
1.	Usaha Mikro	Rp0 – Rp500 juta	Rp0 - Rp300 juta
2.	Usaha Kecil	>Rp50 juta – Rp500 juta	>Rp300 juta – Rp2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>Rp500 juta – Rp10 Miliar	>Rp2,5 Miliar – Rp50 Miliar

Sumber: Diolah dari UU 20/2008

Tabel II.2 Kriteria UMKM Menurut PP 7/2021

No.	Keterangan	Kekayaan Bersih (selain tanah dan bangunan)	Hasil Penjualan
1.	Usaha Mikro	Rp0 – Rp500 juta	Rp0 - Rp300 juta
2.	Usaha Kecil	>Rp50 juta – Rp500 juta	>Rp300 juta – Rp2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>Rp500 juta – Rp10 Miliar	>Rp2,5 Miliar – Rp50 Miliar

Sumber: Diolah dari PP 7/2021

2.1.5 Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

Insentif pajak terdiri dari empat jenis antara lain pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan pengenaan pajak, pengurangan tarif serta penangguhan pajak (Suandy, 2006, dikutip dalam Jessica, 2021). Jenis insentif pajak ini diberikan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Pajak ditanggung pemerintah merupakan pembebasan dalam pembayaran pajak sehingga pajak ditanggung pemerintah termasuk ke dalam jenis insentif pengecualian dari

pengenaan pajak. Menurut Samsuar Said (2008, dikutip dalam Apriliasari 2021), subsidi pajak yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk pengalokasian anggaran untuk memberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah.

2.1.6 Insentif PPh Final DTP bagi Wajib Pajak PP 23

Selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Wajib Pajak UMKM mengalami penurunan pendapatan sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai insentif PPh final DTP yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang mana dalam menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Kebijakan pertama kali dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Kebijakan tersebut berlaku dari April s.d. September 2020. Namun, karena pandemi Covid-19 terus berlangsung maka kebijakan mengenai insentif PPh final DTP mengalami beberapa kali pergantian. Kebijakan terakhir insentif PPh final DTP terdapat dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Kebijakan tersebut memiliki isi yang sama dengan PMK sebelumnya, yang membedakan hanya jangka waktu pemanfaatan insentif PPh final DTP yang dapat dimanfaatkan hingga masa pajak Desember 2021.

Fasilitas insentif PPh final DTP ini memiliki prosedur yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak apabila ingin memanfaatkan fasilitas tersebut. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa insentif pajak dapat dimanfaatkan apabila Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu sudah melakukan pemenuhan berupa penyampaian laporan realisasi PPh final yang ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu

pada laman *www.pajak.go.id* sesuai dengan format yang telah dilampirkan dalam peraturan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), laporan realisasi PPh final DTP mencakup seluruh transaksi PPh final. Dalam Pasal 6 ayat (5) mengatur batas waktu penyampaian atas laporan realisasi maksimal tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pasal 6 ayat (6) menyebutkan bahwa laporan realisasi yang tidak disampaikan menyebabkan Wajib Pajak tidak bisa ikut menikmati insentif pajak PPh final DTP ini. Menurut Pasal 6 ayat (9), penyampaian laporan realisasi dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Surat Keterangan. Surat Keterangan dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak memenuhi persyaratan sesuai PP 23/2018.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai insentif pajak selama pandemi Covid-19. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiman dkk (2020) dengan judul Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara, dampak dari Covid-19 berbanding terbalik dengan pemanfaatan insentif pajak PPh final DTP terhadap UMKM Tenun Troso Jepara. Pemanfaatan insentif tersebut mendapat respons positif dari Wajib Pajak UMKM Tenun Troso Jepara yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kepatuhan dari Wajib Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif berupa kuesioner serta analisis regresi berganda. Namun, penelitian ini masih terkendala dengan kurangnya sampel sehingga hasil yang diperoleh kurang optimal. Perbedaan dalam

penelitian ini ada pada objek yang diteliti yakni hanya fokus pada satu bidang usaha UMKM yaitu usaha Tenun Troso serta metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif berupa kuesioner dan regresi berganda.

Selain itu, studi kasus yang dilakukan oleh Fauzi dan Apriliawati (2021) di KPP Pratama Kuningan, dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah dengan hasil yang tidak jauh berbeda menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh final UMKM mengalami kenaikan meskipun sosialisasi mengenai insentif pajak menjadi kurang efektif karena peraturan insentif pajak yang sering berubah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu KPP Pratama Kuningan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Apriliasari (2021) dalam jurnal yang berjudul Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu, menyatakan bahwa pemanfaatan insentif PPh final DTP masih terbilang belum optimal karena adanya kendala baik dari pihak Wajib Pajak UMKM maupun pihak KPP Pratama. Prosedur pemanfaatan insentif pajak yang sulit dipahami menjadi salah satu alasan utama Wajib Pajak tidak memanfaatkan insentif PPh final DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Perbedaan dengan tulisan ini ada pada metode penelitian yang juga menggunakan metode kuantitatif serta objek penelitian di KPP Pratama XYZ.

Pemanfaatan yang masih sangat rendah juga disampaikan oleh Rizky (2021) dalam penelitiannya berupa Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul

Tinjauan Atas Penerapan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 bagi Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jambi Pelayangan. Dalam tulisannya, Rizky menyatakan bahwa rendahnya informasi serta sistem insentif PPh final DTP menjadi kunci kurang optimalnya pemanfaatan insentif PPh final DTP. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objeknya yakni Wajib Pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Jambi Pelayangan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sitindaon & Bandiyono (2021) dalam jurnal yang berjudul Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final bagi UMKM di KPP Pratama Balige pada Masa Pandemi Covid-19. Bandiyono & Sitindaon menyimpulkan bahwa pemanfaatan insentif PPh final DTP masih belum efektif karena penerimaan PPh final UMKM di tahun 2020 meningkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian di KPP Pratama Balige.

Perbandingan dari kelima penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagian besar metode yang digunakan adalah sama yakni metode kualitatif namun perbedaan terletak pada objek penelitian Wajib Pajak yang dilakukan di wilayah KPP Pratama Bengkulu Dua.